

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Indonesia saat ini mengalami perkembangan yang pesat dan berperan penting dalam perekonomian masyarakat. Perkembangan LKM ini hampir 51,2 juta unit atau hampir 99,9% Unit Usaha Mikro Dan Kecil (UMKM) mendominasi sebagai pelaku usaha perekonomian di Indonesia. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) bisa dikatakan sebagai instrumen penting dalam sektor keuangan yang dibutuhkan oleh masyarakat kecil dan menengah untuk mendukung kegiatan usaha konsumtif maupun produktif.¹

Tabel 1. 1 Jumlah Pertumbuhan LKM (Lembaga Keuangan Mikro) di Indonesia Per 2016-2018

LKM (Lembaga Keuangan Mikro)		2016	2017	2018	Total	
Konvensional	Koperasi	98	132	101	331	390
	PT	17	19	22	58	
Syariah	Koperasi	14	29	59	102	103
	PT	-	-	1	1	

Sumber: OJK (Otoritas Jasa Keuangan)

Pertumbuhan UMKM di Indonesia tidak terlepas dari peran LKM (Lembaga Keuangan Mikro) yang memiliki berbagai produk untuk membantu

¹ Abdul Rasyid, "Sekilas Tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Indonesia", *Business Law*, 08/04/19.

meningkatkan pendapatan UMKM. Disamping perbankan, LKM yang merupakan lembaga non-bank, baik konvensional maupun syariah sangat mempengaruhi lajunya tingkat pendapatan bagi pelaku UMKM di Indonesia. Dari tabel 1.1 dapat kita lihat bahwa jumlah LKM konvensional lebih tinggi dibandingkan dengan LKM syariah, memang peran LKM syariah tidak begitu banyak tapi pertumbuhan LKM syariah cenderung terus mengalami kenaikan dari LKM konvensional. Di tiga tahun terakhir ini jumlah LKM syariah terus mengalami kenaikan meskipun tidak sebanyak jumlah LKM konvensional, akan tetapi di LKM konvensional pada bagian koperasi mengalami penurunan yang tidak sedikit..

Tabel 1. 2 Data UMKM di Provinsi Jawa Timur Tahun 2018

NO.	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH UMKM
1.	Ponorogo	207.561
2.	Blitar	255.622
3.	Kediri	251.493
4.	Malang	414.516
5.	Gresik	168.393
6.	Surabaya	260.762

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur

Tabel 1.2 adalah data jumlah sebagian kota/ kabupaten yang diambil dan yang paling tinggi di provinsi jawa timur pada tahun 2018 dari sumber dinas koperasi UMKM Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Malang memiliki jumlah UMKM paling tinggi dari kota/kabupaten lain yang berada di Provinsi Jawa Timur, jumlahnya pun jauh lebih banyak dari yang lain.

Tabel 1. 3 Data UMKM Malang Menurut Sektor/Lapangan Usaha Tahun 2018

KABUPATEN/ KOTA	Pertanian	Industri pengolahan	Perdagangan, Hotel dan Restoran	Transportasi	Jasa-jasa
Malang	244,934	20,894	106,061	15,101	24,480

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur

Dari tabel 1.3 menunjukkan bahwa sub sektor terbesar UMKM Malang ada di sektor pertanian, perdagangan, hotel dan restoran. Tercatat pendapatan setiap tahunnya sebesar 41 T pada sektor UMKM.², dari jumlah dan pendapatan yang cukup besar yang dihasilkan oleh UMKM Malang, maka dibutuhkan sebuah lembaga keuangan mikro (LKM) yang memberikan peran penting dalam sektor permodalan, pembinaan dan lain-lain demi menjaga peningkatan UMKM itu sendiri.

Memperkuat dari sektor usaha mikro ini, akan meningkatkan keberhasilan bagi UMKM itu sendiri yang mana itu juga termasuk dalam anjuran islam untuk mensejahterakan masyarakat yang masih mengalami kesulitan dalam peningkatan pendapatannya. Dalam meningkatkan keberhasilan UMKM menekankan pada proses memberikan kemampuan kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong individu supaya termotivasi untuk mengembangkan kemampuan usahanya. Dengan memberikan peluang usaha dan memberikan pelatihan serta permodalan yang nantinya bisa memberikan para pengusaha kecil untuk memulai dan mengelola

² UMKM 418 Ribu, Pendapatan Rp 41 Triliun dalam *Malang Post*. 08/12/2017,

usahanya. Permasalahan yang sering dihadapi oleh UMKM adalah permodalan, meskipun ada peluang bisnis di pasar, akan tetapi jika tidak mempunyai modal yang cukup, maka akan sangat kesulitan dalam menghadapi persaingan pasar untuk saat ini, karena permodalan merupakan unsur yang penting dalam mendukung peningkatan produksinya.

Dalam penelitian oleh Euis Amalia, untuk penyaluran dana BMT 2012-2014 kurang lebih 50 % pembiayaan BMT disalurkan dengan akad *murabahah*. Sedangkan *musyarakah* 14 %, *mudharabah mutlaqah* 9 %, IMBT 2 %, *ijarah* 1 % dan akad lain 24 %.³ Dalam studi kasus pada Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah kantor Cabang Buah Batu, peneliti membandingkan akad pembiayaan akad *musyarakah mutanaqisah* dan akad *murabahah* terhadap pembiayaan kepemilikan rumah dengan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP). Dalam studi perbandingan pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) ini akad *murabahah* dinilai lebih cocok meskipun dengan harga yang lebih tinggi dari akad *musyarakah mutanaqisah*. Dari kedua studi tersebut dapat kita lihat bahwa pembiayaan *murabahah* lebih sering di gunakan oleh lembaga keuangan bank maupun non-bank, maka potensi pembiayaan *musyarakah* ini belum dapat kita lihat perannya secara utuh di masyarakat.⁴

Dari sekian banyak BMT, BMT Al Hikmah Semesta menjadi objek yang menarik untuk diteliti. Keunikan BMT Al Hikmah Semesta adalah, dalam

³ My Sharing, Yogie Respati, *Pembiayaan Murabahah Dominasi BMT*, diakses pada tanggal 30/03/19 dari : <http://keuangansyariah.mysharing.co/pembiayaan-murabahah-dominasi-bmt/>

⁴ Agung Maulana, Dkk, “Analisis Perbandingan Akad *Murabahah* dan *Musyarakah mutanaqisah* Terhadap Pembiayaan Kepemilikan Rumah (KPR) Dengan Metode AHP, *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. IV No.2, Tahun 2018, 476.

melaksanakan pembiayaan untuk kemajuan UMKM, BMT ini lebih dominan menggunakan akad *musyarakah mutanaqisah*. Dari sekian banyaknya BMT, hanya beberapa persen BMT yang lebih dominan menggunakan pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* dalam meningkatkan pendapatan UMKM. Dikarenakan DSN menghimbau, bagi yang sudah mengikuti pelatihan tentang akad *musyarakah mutanaqisah* ini, maka segera mengaplikasikan akad yang sudah disepakati oleh DSN.⁵ Keputusan DSN mengenai rekomendasi akad *musyarakah mutanaqisah* ini merupakan hasil dari beberapa pertimbangan, karena DSN mempunyai peran yaitu: 1) menyerap aspirasi dan kebutuhan finansial lalu kemudian merumuskan bersama manajemen bank syariah atau lembaga keuangan syariah seperti BMT dan lainnya, 2) mensosialisasikan hasil rumusan produk tersebut terhadap masyarakat, sekaligus memberikan informasi mengenai keunggulan produk *mu'amalah maaliyah* dan perbedaannya dengan produk yang ada unsur ribawi.⁶

Dengan adanya akad yang baru diterapkan ini, maka peneliti tertarik untuk menganalisis sejauh mana potensi akad pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* ini sehingga peneliti mengambil judul “Analisis Pembiayaan *Musyarakah mutanaqisah* Pada BMT Al Hikmah Semesta Jawa Timur di Kabupaten Malang”.

⁵ Wawancara dengan Mas Yaser Kasenda (bagian bendahara) di Kantor BMT Al hikmah Semesta pada tanggal 01 Oktober 2019 pukul 09.30 WIB.

⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, 239.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat di rumuskan masalah, Apakah pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* akad yang paling dominan pada BMT Al Hikmah Semesta Jawa Timur?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah *musyarakah mutanaqisah* akad yang paling dominan pada BMT Al Hikmah Semesta Jawa Timur

C. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang upaya BMT dalam meningkatkan kualitas produknya.

b. Bagi Akademisi

Dapat memberikan wawasan dan rujukan bagi mahasiswa atau peneliti selanjutnya mengenai pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* di BMT Al Hikmah Semesta.

2. Manfaat praktis

a. Bagi peneliti

Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman mengenai praktik BMT dalam upayanya memberikan kontribusi terhadap UMKM dalam produk barunya.

b. Bagi Lembaga (BMT)

Diharapkan mampu memberikan informasi bagi pihak lembaga keuangan syariah BMT dalam mempertimbangkan akad pembiayaan yang lebih dominan dalam aplikasinya membantu masyarakat dan BMT sendiri.

D. Batasan Istilah

1. *Musyarakah mutanaqisah*

Dalam penelitian ini *Musyarakah mutanaqisah* yang dimaksud ialah, kerja sama antara para syarik (nasabah dengan bank) dalam melakukan pembelian suatu barang, kemudian barang tersebut dijadikan “modal usaha” oleh nasabah guna memperoleh keuntungan yang akan dibagi antara nasabah dengan bank disertai pembelian barang modal milik bank yang dilakukan secara berangsur sampai seluruh porsi aset kepemilikan jatuh ke kepada nasabah.⁷

E. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini digunakan untuk menghindari pelebaran pokok masalah sehingga pokok permasalahan dalam penelitian ini lebih fokus dan terarah, adapun beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Luas lingkup hanya meliputi data laporan penyaluran dan margin pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* di BMT Al Hikmah Semesta.

⁷ Maulana Hasanudin, Jaih Mubarak, perkembangan Akad *Musyarakah*, (Jakarta: Kencana 2012), 60

2. Informasi yang disajikan yaitu empat akad pembiayaan dengan presentasi terbesar di BMT Al Hikmah Semesta sebagai pembanding diantaranya: akad *Rahn Tasjily*, *murabahah*, *ijarah muntahia bit-tamlik*, *musyarakah mutanaqisah*.

